

FAKTOR PENYEBAB KETIDAKIKUTSERTAAN PESERTA MANDIRI DALAM PROGRAM RENCANA PEMBAYARAN BERTAHAP (REHAB) BPJS KESEHATAN DI KABUPATEN KEDIRI

Oleh:

Nurul Imama¹, Ngesti W Utami², Eko Rahman S³

Program Studi D-III Asuransi Jurusan RMIK Poltekkes Malang¹⁻²⁻³

nadiaatha81@gmail.com¹, ngesti_w@poltekkes-malang.ac.id²,

eko_rahman_s@poltekkesmalang.ac.id³

ABSTRAK

Kepesertaan JKN mandiri (PBPU) mengalami peningkatan jumlah yang tidak sejalan dengan keteraturan peserta dalam membayar iuran JKN. pada bulan Desember 2024 terdapat 72.573 peserta JKN segmen PBPU atau peserta mandiri tidak aktif dikarenakan tunggakan iuran. Berdasarkan masalah diatas Program REHAB (Rencana Pembayaran Bertahap) BPJS Kesehatan hadir untuk memberikan solusi dan kemudahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab ketidakikutsertaan peserta mandiri dalam program Rencana Pembayaran Bertahap (REHAB) BPJS Kesehatan di Kabupaten Kediri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Objek penelitian ini adalah 100 responden dari peserta mandiri BPJS Kesehatan Kabupaten Kediri yang iurannya menunggak. Teknik pengumpulan data dengan cara mengisi kuesioner. Kesimpulan dari penelitian ini, yaitu tingkat pengetahuan peserta mandiri BPJS Kesehatan Kabupaten Kediri tergolong cukup. Tingkat sosial ekonomi peserta mandiri BPJS Kesehatan Kabupaten Kediri tergolong rendah. Tingkat persepsi peserta mandiri BPJS Kesehatan Kabupaten Kediri tergolong negatif. Saran yang dapat peneliti berikan sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian ini adalah kepada pihak BPJS Kesehatan dapat melaksanakan sosialisasi mengenai program Rencana Pembayaran Bertahap (REHAB) melalui platform media internet, kepada para kader JKN BPJS Kesehatan di desa dapat memberikan sosialisasi dan informasi mengenai program Rencana Pembayaran Bertahap (REHAB) secara langsung kepada para Peserta JKN. Kepada peserta diharapkan berperan aktif memanfaatkan program Rencana Pembayaran Bertahap (REHAB) BPJS Kesehatan terutama bagi peserta PBPU/Mandiri yang iurannya menunggak.

Kata Kunci: Pengetahuan, Sosial Ekonomi, Persepsi, BPJS Kesehatan, Rencana Pembayaran Bertahap (REHAB)

ABSTRACT

Independent participation which has been increasing for a long time is not in line with the regularity of participants in paying JKN contributions. in December 2024 there were 72,573 JKN participants in the PBPU segment or inactive independent participants due to contribution arrears. Based on the above problems, the BPJS Kesehatan REHAB (Graduated Payment Plan) Program is here to provide solutions and convenience. The purpose of this study was to determine the factors causing non-participation of independent participants in the BPJS Kesehatan Graduated Payment Plan (REHAB) program in Kediri Regency. The method used in this study is a quantitative descriptive method. The object of this study was 100 respondents from independent participants of BPJS Kesehatan Kediri Regency whose contributions were in arrears. Data collection techniques were by filling out questionnaires. The conclusion of this study is that the level of knowledge of independent participants of BPJS Kesehatan Kediri Regency is quite sufficient. The socio-economic level of independent participants of BPJS Kesehatan Kediri Regency is relatively low. The level of perception of independent participants of BPJS Kesehatan Kediri Regency is relatively negative. The suggestions that researchers can provide as a follow-up to the results of this study are that BPJS Kesehatan can carry out socialization regarding the Graduated Payment Plan (REHAB) program through the internet media platform, to JKN BPJS Kesehatan cadres in the village can provide socialization and information regarding the Graduated Payment Plan (REHAB) program directly to JKN Participants. Participants are expected to play an active role in utilizing the BPJS Kesehatan Graduated Payment Plan (REHAB) program, especially for PBPU/Independent participants whose contributions are in arrears.

Keywords: Knowledge, Socioeconomic, Perception, BPJS Kesehatan, Graduated Payment Plan (REHAB)

A. PENDAHULUAN

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. Salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kesehatan yaitu dengan menjalankan program Jaminan Kesehatan

Seluruh penduduk Indonesia berhak mendapatkan kesejahteraan sosial dan kepastian perlindungan yang adil dan merata dari pemerintah. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu dibentuk sebuah lembaga berbadan hukum yang manfaatnya digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta. Sebagai bentuk perwujudan dari Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan dibentuk dengan menganut prinsip nirlaba, kehati-hatian, kegotongroyongan, keterbukaan, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan yang bersifat wajib bagi seluruh rakyat Indonesia, dan dana amanat yang hasil pengelolaan dananya dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, 2013).

Pembentukan Badan Penyelenggaraan

Jaminan Sosial Kesehatan mempunyai peran penting dalam proses menuju cakupan seluruh penduduk Indonesia menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional. Salah satu peran BPJS Kesehatan yaitu meningkatkan kepatuhan peserta dengan mendorong partisipasi masyarakat guna mensukseskan program JKN. Upaya BPJS Kesehatan untuk mendorong partisipasi masyarakat menjadi peserta JKN tidak lepas dari semua sektor yang turut mendukung dan membantu agar program ini berjalan lancar dengan harapan seluruh Warga Negara Indonesia mendapat perlindungan kesehatan dengan terdaftar menjadi peserta JKN (Kuraini, 2021).

Menurut Perpes No 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan Peserta JKN terdiri atas Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) mencakup masyarakat tidak mampu dan fakir miskin yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah. Sementara untuk peserta Non PBI mencakup Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri, Bukan Pekerja (BP), dan Pekerja Penerima Upah (PPU). Terdapat 3 pilihan kelas rawat inap dengan nominal iuran sebesar Rp 150.000 untuk manfaat pelayanan rawat inap di ruang kelas I, Rp 100.000 untuk manfaat pelayanan rawat inap di ruang kelas II, dan Rp 35.000 untuk manfaat pelayanan rawat inap di ruang kelas III. Besar iuran peserta PBPU dan BP

disesuaikan dengan kondisi keuangan dan kemampuan membayar. Menurut Perpres No 12 Tahun 2013 Iuran merupakan sejumlah uang yang dibayarkan secara rutin oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau pemerintah. Iuran peserta PBPU dibayarkan setiap bulan sebelum tanggal 10. Apabila tanggal 10 bertepatan dengan hari libur, maka pembayaran dapat dilakukan di tanggal berikutnya pada hari kerja (Jaminan Kesehatan, 2020).

Keberlangsungan peserta JKN PBPU dalam membayar iuran menjadi faktor penting dalam keberlanjutan program JKN. Iuran menjadi komponen utama peserta mandiri agar dapat memanfaatkan pelayanan kesehatan. dengan JKN KIS (Kartu Indonesia Sehat). Bekerja Informal dan pendapatan yang tidak menentu menjadi factor yang dapat mempengaruhi seluruh sektor kehidupan, termasuk faktor ekonomi. Pekerja informal yang kehilangan pekerjaan mengakibatkan pendapatan berkurang dan mempengaruhi kemampuan serta kemauan peserta mandiri dalam membayar iuran JKN (Dewiyani, 2021).

Berdasarkan situs resmi BPJS Kesehatan Kabupaten Kediri pada bulan Desember 2024, jumlah peserta JKN di Indonesia mencapai 282.477.584 jiwa. Sedangkan untuk Provinsi Jawa Timur

tercatat 41.714.928 jiwa telah menjadi peserta JKN. Berdasarkan data yang diperoleh dari BPJS Kesehatan Kabupaten Kediri sampai dengan Desember 2024 kepesertaan program JKN di Kabupaten Kediri sebanyak 1.688.468 jiwa. Peserta yang iurannya bersumber dari APBD berjumlah 302.685 jiwa dan peserta yang bersumber dari APBN sebanyak 803.302 jiwa. Sedangkan peserta non PBI terdiri atas Pekerja Penerima Upah (PPU) berjumlah 302.292 jiwa, Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) berjumlah 195.566 jiwa, dan Bukan Pekerja (BP) berjumlah 32.437 jiwa.

Berdasarkan data yang didapat dari BPJS Kesehatan Kabupaten Kediri pada bulan Desember 2024 terdapat 72.573 atau 37,10% dari 195.566 peserta JKN segmen PBPU atau peserta mandiri tidak aktif, dikarenakan tunggakan iuran dan tercatat 549 peserta mandiri yang mendaftar program REHAB. Hal ini menunjukkan bahwa peserta mandiri di Kabupaten Kediri mengalami kendala dalam memenuhi kewajiban dalam membayar iuran. Tingginya angka ketidakaktifan ini dapat menjadi indikator adanya tantangan finansial yang dihadapi oleh peserta. Ketidakaktifan tersebut dapat mengakibatkan peningkatan risiko kesehatan peserta mandiri yang tidak dapat menggunakan layanan kesehatan, dan harus

melunasi tunggakan iuran terlebih dahulu atau memilih menjadi pasien umum.

Berdasarkan masalah diatas Program REHAB (Rencana Pembayaran Bertahap) BPJS Kesehatan hadir untuk memberikan solusi dan kemudahan kepada peserta mandiri yang mempunyai tunggakan iuran lebih dari 3 bulan (4 s.d 24 bulan) dengan maksimal 12 tahapan untuk periode pembayaran. Proses pendaftaran program REHAB dapat dilakukan melalui Aplikasi Mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165 (Gelonita et al., 2024). Sebanyak 3 dari 5 peserta mandiri yang datang ke Kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Kediri bersedia mengikuti program REHAB guna mengembalikan status kepesertaan menjadi aktif. Tetapi 2 dari 5 peserta mandiri belum berkenan mengikuti program REHAB dengan berbagai alasan, diantaranya kesulitan memahami prosedur program, ingin diskusi terlebih dahulu dengan keluarga, kesulitan mengakses program REHAB melalui Mobile JKN, dan ingin mengumpulkan uang terlebih dahulu sehingga dapat melunasinya secara tunai. Hal ini dinilai dapat menambah besar jumlah tunggakan dan mengakibatkan angka peserta mandiri yang tidak aktif meningkat..

Kepesertaan yang tidak aktif diakibatkan oleh tingkat pengetahuan peserta mandiri yang kurang tepat. Peserta

beranggapan bahwa merasa rugi arena tidak pernah sakit tetapi tetap diminta membayar iuran kepada BPJS Kesehatan. Selain hal tersebut, persepsi kelompok masyarakat juga berperan dalam mempengaruhi keputusan pembayaran iuran. Peserta cenderung memiliki harapan tinggi terhadap kualitas pelayanan kesehatan. Jika tidak memadai dan merasa sudah tidak perlu menggunakan layanan kesehatan, hal ini dapat mempengaruhi keputusan mereka dalam membayar iuran sehingga melakukan penunggakan (Anisa & Bahri, 2024).

Berdasarkan penjelasan latar belakang dirasa perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui Faktor Penyebab Ketidakikutsertaan Peserta Mandiri (PBPU) dalam Program Rencana Pembayaran Bertahap (REHAB) BPJS Kesehatan di Kabupaten Kediri.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan implementasi sistem perlindungan sosial di bidang kesehatan yang bertujuan menjamin seluruh masyarakat memperoleh akses layanan kesehatan yang adil dan merata. Kebijakan ini berlandaskan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang menegaskan bahwa setiap

warga negara berhak atas jaminan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. Dalam pelaksanaannya, pemerintah membentuk BPJS Kesehatan sebagai badan hukum yang menyelenggarakan program JKN dengan prinsip nirlaba, gotong royong, transparansi, dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

Kepesertaan JKN terbagi menjadi dua kelompok, yaitu Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan non-PBI. Kelompok non-PBI meliputi Pekerja Penerima Upah (PPU), Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), dan Bukan Pekerja (BP), dengan kewajiban membayar iuran secara rutin setiap bulan sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan. Iuran merupakan komponen utama dalam menjaga keberlanjutan program JKN, terutama bagi peserta mandiri (PBPU) yang tidak mendapatkan subsidi pemerintah. Kepatuhan dalam membayar iuran menjadi faktor penting dalam memastikan keberlangsungan layanan kesehatan bagi peserta (Kuraini, 2021).

Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa kemampuan membayar iuran sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi peserta. Pekerja sektor informal

yang memiliki pendapatan tidak tetap cenderung mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran iuran, sehingga berpotensi menunggak dan menjadi peserta tidak aktif (Dewiyani, 2021). Ketidaktifan kepesertaan ini dapat berdampak pada terbatasnya akses layanan kesehatan serta meningkatnya risiko kesehatan bagi individu.

Sebagai upaya mengatasi permasalahan tunggakan iuran, BPJS Kesehatan menghadirkan Program REHAB (Rencana Pembayaran Bertahap) yang memberikan kemudahan bagi peserta untuk melunasi tunggakan secara cicilan. Program ini dirancang untuk meningkatkan kembali status aktif kepesertaan, namun dalam praktiknya partisipasi peserta masih dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pemahaman terhadap prosedur, kemudahan akses layanan digital, serta kondisi finansial peserta (Gelonita et al., 2024).

Selain faktor ekonomi, tingkat pengetahuan dan persepsi masyarakat juga berperan penting dalam menentukan kepatuhan pembayaran iuran. Peserta dengan pemahaman yang kurang tepat cenderung memiliki persepsi negatif terhadap program JKN, misalnya merasa dirugikan karena jarang memanfaatkan layanan kesehatan. Persepsi terhadap kualitas pelayanan

kesehatan juga memengaruhi keputusan peserta untuk tetap membayar iuran atau menunggak (Anisa & Bahri, 2024). Oleh karena itu, peningkatan literasi kesehatan dan pemahaman masyarakat mengenai manfaat JKN menjadi aspek penting dalam mendukung keberhasilan program ini secara berkelanjutan.

C. METODE

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan desain survei untuk menggambarkan faktor penyebab ketidakikutsertaan peserta mandiri BPJS Kesehatan Kabupaten Kediri dalam program REHAB. Variabel penelitian meliputi tingkat pengetahuan, sosial ekonomi, dan persepsi responden yang diukur melalui kuesioner online berbasis Google Form. Populasi penelitian adalah peserta mandiri BPJS Kabupaten Kediri yang mengalami tunggakan iuran, berjumlah 72.024 orang. Jumlah sampel diambil 100 responden yang ditentukan berdasarkan rumus Slovin dan dipilih dengan teknik purposive sampling dengan kriteria inklusi dan eksklusi. Instrumen pengumpulan data penelitian berupa kuesioner untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan persepsi tentang program REHAB dan tingkat sosial ekonomi. Data penelitian

yang dikumpulkan meliputi data primer melalui survei online dan data sekunder dari BPJS Kesehatan Kabupaten Kediri. Instrumen penelitian yang digunakan telah diuji validitas dan reliabilitasnya pada 30 responden dengan hasil seluruh pertanyaan valid serta reliabel (Cronbach Alpha > 0,6). Teknik pengolahan data meliputi editing, coding, scoring, dan tabulasi, kemudian dianalisis secara deskriptif serta disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Berdasarkan data responden sebanyak 100 orang, mayoritas berjenis kelamin perempuan (56%) dibandingkan laki-laki (44%). Sebagian besar berada pada rentang usia 25–35 tahun (64%), diikuti usia 36–45 tahun (25%) dan 46–55 tahun (11%). Dari segi pendidikan, mayoritas lulusan SMA (44%) dan perguruan tinggi (43%), sementara SMP (11%) dan SD (2%) lebih sedikit. Berdasarkan pekerjaan, sebagian besar adalah wiraswasta (45%), disusul pedagang (20%), buruh (18%), dan tidak bekerja (17%).

Karakteristik	Kategori	F	(%)
Jenis Kelamin	Perempuan	56	56%
	Laki-laki	44	44%
Usia	25 – 35 Tahun	64	64%
	36 – 45 Tahun	25	25%
	46 – 55 Tahun	11	11%
Tingkat Pendidikan	SD	2	2%
	SMP	11	11%
	SMA	44	44%
	PT	43	43%
Pekerjaan	Wiraswasta	45	45%
	Pedagang	20	20%
	Buruh	18	18%
	Tidak Bekerja	17	17%
Total Responden		100	100%

Gambar.1 Karakteristik berdasar Jenis kelamin, Umur, Pendidikan dan Pekerjaan

Berdasarkan data tingkat pengetahuan responden, mayoritas berada pada kategori cukup yaitu sebanyak 40 orang (40%), diikuti kategori baik sebanyak 33 orang (33%), dan kategori kurang sebanyak 27 orang (27%). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki tingkat pengetahuan yang berada pada kategori sedang.

No	Pengetahuan	F	%
1	Baik	33	33%
2	Cukup	40	40%
3	Kurang	27	27%
	Total	100	100%

Gambar.2 Distribusi Frekuensi Penyebab Ketidakikutsertaan berdasarkan tingkat

Berdasarkan data sosial ekonomi responden, sebagian besar berada pada kategori rendah yaitu sebanyak 57 orang (57%), sedangkan kategori tinggi berjumlah 43 orang (43%). Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki tingkat sosial ekonomi yang relatif rendah

No	Sosial Ekonomi	F	%
1	Tinggi	43	43%
2	Rendah	57	57%
	Total	100	100%

Gambar.3 Distribusi Frekuensi Penyebab Ketidakikutsertaan Responden Berdasarkan Tingkat Sosial Ekonomi

Berdasarkan data persepsi responden, sebagian besar memiliki persepsi negatif

yaitu sebanyak 54 orang (54%), sedangkan yang memiliki persepsi positif berjumlah 46 orang (46%). Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden cenderung memiliki persepsi negatif.

No	Persepsi	F	%
1	Negatif	54	54%
2	Positif	46	46%
	Total	100	100%

Gambar.4 Distribusi Frekuensi Penyebab Ketidakikutsertaan Responden Berdasarkan Tingkat Persepsi

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan peserta JKN mandiri (PBPU) yang tidak mendaftar program REHAB, masih terdapat sebesar 27% kategori kurang dan 40% kategori cukup yang menunjukkan bahwa responden belum mengetahui dengan baik tentang program REHAB terkait dengan penyelesaian tunggakan membayar iuran . Hal tersebut berpotensi peserta JKN mandiri tidak ingin ikut program REHAB. Hal tsb seperti dijelaskan dalam penelitian Wulandari et al., (2020) yang menyatakan bahwa tingkat pengetahuan mempengaruhi keikutsertaan peserta mandiri dalam program REHAB. Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pengetahuan adalah informasi yang telah disapatkan. Informasi yang sering diberikan atau disosialisasikan melalui media dari BPJS Kesehatan tentang

tunggakan iuran dalam program REHAB dapat mempengaruhi keputusan peserta mandiri untuk ikut serta dalam program REHAB, dan bermanfaat sebagai upaya mengembalikan kepesertaan JKN yang non aktif.

Peserta mandiri yang telah mendapatkan informasi tentang program REHAB akan memiliki keinginan yang tinggi untuk mendaftarkan diri dalam program REHAB, dibandingkan dengan peserta yang kurang mengetahui informasi tentang program REHAB. Kurangnya pengetahuan peserta mengenai program REHAB merupakan faktor penghambat keberlanjutan status kepesertaan jaminan kesehatan peserta mandiri (Nur Aziza Ramadani et al., 2021).

Berdasarkan hasil penelitian pendapatan responden di Kabupaten Kediri yang terbanyak kategori rendah atau dibawah UMR/bulannya yaitu sebesar 57% dan 43% memiliki pendapatan diatas UMR Kabupaten Kediri. Hal tersebut sesuai dengan yang dijelaskan dalam data hasil penelitian dari Wulandari et al., (2020), bahwa terdapat hubungan antara tingkat pendapatan dengan kepatuhan pembayaran iuran JKN.

Penjelasan hasil penelitian yang lain menurut Pratiwi et.al. (2022) bahwa peserta

mandiri yang memiliki pendapatan rendah, akan memprioritaskan pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, seperti biaya makan, pendidikan, listrik, dan biaya lainnya, sedangkan untuk biaya kesehatan, peserta mandiri cenderung belum memprioritaskan dikarenakan masih dalam kondisi sehat. Situasi ini menunjukkan adanya pertimbangan ekonomi yang lebih mendesak dalam kehidupan sehari-hari mereka

Menurut hasil penelitian yang lain dijelaskan juga bahwa terdapat peserta mandiri dengan pendapatan tinggi yang belum berkenan mendaftar dalam program REHAB meskipun memiliki tunggakan iuran. Pada dasarnya keluarga yang berpendapatan tinggi merasa tidak terlalu bergantung pada layanan BPJS Kesehatan, hal ini dikarenakan peserta masih sanggup membayar ditempat praktek atau klinik ketika memerlukan pelayanan kesehatan tanpa memikirkan nominal yang harus dibayarkan, terlebih ketika membutuhkan pelayanan kesehatan yang mendesak (Risdayanti & Andi Surahman Batara, 2021).

Menurut data hasil penelitian persepsi responden sebagian besar persepsi negatif yaitu sebesar 54% dan persepsi positif sebesar 46%. Hal ini dapat didukung

oleh kurangnya pemahaman mengenai manfaat dan mekanisme program, sehingga membuat peserta ragu untuk mengikutinya. Selain itu, penelitian dari (Febriadi et al., 2021) menyatakan bahwa pengalaman negatif terhadap pelayanan BPJS Kesehatan sebelumnya juga dapat mempengaruhi kepercayaan peserta terhadap efektivitas program ini. Penelitian tersebut menemukan bahwa peserta mandiri membutuhkan pelayanan kesehatan, faskes tidak memberikan pelayanan yang sesuai harapan dan menimbulkan kekecewaan sehingga BPJS Kesehatan dianggap tidak mampu memberikan perlindungan terhadap hak pesertanya. Beberapa peserta meragukan apakah program ini benar-benar dapat membantu mengelola biaya kesehatan mereka secara efektif. Di sisi lain, peserta yang memiliki persepsi positif terhadap program ini umumnya lebih memahami manfaat dari skema pembayaran bertahap dan menganggapnya sebagai solusi yang meringankan beban finansial mereka (Gelonita et al., 2024).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai faktor penyebab ketidakikutsertaan peserta mandiri dalam Program Rencana Pembayaran Bertahap (REHAB) BPJS

Kesehatan di Kabupaten Kediri, dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga faktor utama yang memengaruhi keputusan peserta. Pertama, tingkat pengetahuan peserta mandiri yang menunggak iuran cenderung masih kurang atau hanya pada kategori cukup mengenai program REHAB. Minimnya informasi dan pengetahuan yang jelas serta kurangnya sosialisasi yang intensif dari pihak BPJS menjadi penghambat utama bagi peserta untuk ikut serta. Kedua, faktor sosial ekonomi juga berperan besar, di mana sebagian besar peserta memiliki tingkat pendapatan rendah sehingga lebih memprioritaskan kebutuhan sehari-hari daripada membayar iuran, yang pada akhirnya menunda partisipasi mereka dalam program. Ketiga, tingkat persepsi negatif terhadap program REHAB turut menjadi hambatan, karena sebagian peserta memiliki pengalaman kurang menyenangkan sebelumnya dengan pelayanan BPJS Kesehatan. Hal ini menimbulkan keraguan dan ketidakpercayaan terhadap program yang ditawarkan, sehingga mengurangi minat untuk bergabung. Dengan demikian, ketiga faktor tersebut saling berkaitan dalam memengaruhi rendahnya tingkat partisipasi peserta mandiri dalam program REHAB.

Sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian ini, peneliti memberikan beberapa

saran kepada Pihak BPJS Kesehatan diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi program REHAB baik secara online melalui media internet, website, maupun video yang mudah dipahami, serta secara offline melalui kelurahan, desa, dan kader JKN agar informasi menjangkau masyarakat yang kesulitan mengakses internet. Peserta, khususnya PBPU atau peserta mandiri yang menunggak iuran, diharapkan lebih aktif memanfaatkan program REHAB karena dapat membantu meringankan tunggakan, menjaga kepesertaan tetap aktif, serta memperoleh pelayanan kesehatan. Saran bagi peneliti selanjutnya adalah mengkaji efektivitas program REHAB di lokasi berbeda dengan skala yang lebih luas menggunakan metode yang lebih komprehensif, seperti wawancara dan observasi langsung.

DAFTAR PUSTAKA

Anisa & Bahri. (2024). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Peserta Mandiri Membayar Iuran BPJS Di Wilayah Kerja Puskesmas Kutalimbaru. *Indonesian Journal of Health Science*, 6(1), 56–65. <https://jurnalku.org/index.php/ijhs/article/view/927/752>

BPJS Kesehatan. (2024). *Program Rehab*. <https://www.bpjs-kesehatan.go.id/#/layanan-program-rehab>

Dewiyani, C. (2021). Ability dan Willingness

To Pay Iuran Jaminan Kesehatan Nasional pada Pekerja Informal di Kota Malang. *Lp3M. Unuja. Ac. Id*. http://perpustakaan.poltekkes-malang.ac.id/assets/file/karyadosen/%5E_Laporan_Hasil_Wahyu_ok.pdf

Febriadi, F., Bustami, E., & Sandi, F. L. (2021). Pengaruh kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat terhadap kepercayaan peserta PBPU BPJS kesehatan pada BPJS Kesehatan Kota Sungai Penuh. *JAN Maha*, 3(12), 135–146.

<https://lppmstianusa.com/ejurnal/index.php/janmaha/article/view/538>

Gelonita, P., Said, M. M. ud, & Sekarsari, R. W. (2024). Evaluasi Pelaksanaan Program Rencana Pembayaran Iuran Bertahap (REHAB) dalam Menjamin Status Keaktifan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (Studi di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Malang). *Respon Publik*, 18(2), 51–59. <http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/10095>

Jaminan Kesehatan, Jdih BPK RI 12 (2020). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/136650/perpres-no-64-tahun-2020>

Kuraini, S. N. (2021). Pengaruh Pengetahuan Terhadap Minat Masyarakat Dalam Kepesertaan Bpjs Kesehatan Di Indonesia. *Jurnal Admmirasi*, 6(2), 23–34. <https://doi.org/10.47638/admmirasi.v6i2.197>

Nur Aziza Ramadani, Haeruddin, & Andi Surahman Batara. (2021). Faktor yang Berhubungan dengan Kepatuhan Membayar Iuran BPJS pada Peserta Mandiri. *Window of Public Health Journal*, 2(2), 203–213. <https://doi.org/10.33096/woph.v2i2.138>

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang

- Jaminan Kesehatan (2013). chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgcle findmkaj/https://fiskal.kemenkeu.go.id/docs/inklusif/Perpres Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.pdf
- Pratiwi, P. E., Yasa, M., & Yasa, M. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Program Jaminan Kesehatan Di Kabupaten Tabanan. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 11(9), 3489. <https://doi.org/10.24843/eep.2022.v11.i09.p06>
- Risdayanti, & Andi Surahman Batara. (2021). Faktor Yang Berhubungan Dengan Penunggakan Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan Mandiri Di Kecamatan Tallo Kota Makassar. *Window of Public Health Journal*, 2(5), 926–937. <https://doi.org/10.33096/woph.v2i5.293>
- Wulandari, A., Syah, N. A., & Ernawati, C. H. T. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Peserta Mandiri Dalam Pembayaran Iuran Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Solok. *Jurnal Universitas Andalas*, 9(1), 7–17. <http://jurnal.fk.unand.ac.id/index.php/jka/article/view/1219/1071>